

PENGARUH TATA KELOLA DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SAKO MARGASARI KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LIONI CATUR SETIAWATI

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl.
Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Jake, Teluk Kuantan, RIAU.

Email: lionicator@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the Effect of Village Fund Governance in Development in Sako Margasari Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency. The research approach used were Quantitative and Qualitative. data collection techniques used interviews and questionnaires. Interviews were conducted with village officials and questionnaires were distributed to the community who were considered to have the potential to provide information about Village Fund Governance in Development. To determine the sample of the community researchers used the Slovin formula and the method of data analysis researchers used simple linear regression.

The results of the study indicate that the influence of Village Fund Management in the Development of Sako Margasari Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency is very strong. This can be proven from the community's response and the results of interviews with village officials that have been processed by researchers using SPSS. Some from the community and also organizations in Sako Margasari Village that also participated in the development program.

Keywords: Influence of Governance, Village Funds, Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada aparatur desa dan Kuesioner disebarakan kepada masyarakat yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi tentang Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan. Untuk menentukan sampel masyarakat peneliti menggunakan rumus slovin dan metode analisis data peneliti menggunakan regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sangat kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan masyarakat dan hasil wawancara kepada aparatur desa yang telah diolah oleh peneliti menggunakan SPSS. Sebagian dari masyarakat dan juga organisasi yang ada di Desa Sako Margasari juga ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci : Pengaruh Tata Kelola, Dana Desa, Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengarahkan Pembangunan untuk mencapai daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, telah di transfer dana desa keseluruh 74.910 desa sebesar Rp. 20.7 triliun pada 2015 dan Rp. 46.9 triliun pada 2016. Pada 2017, Rp. 60 triliun ditranfer ke 33 Provinsi, 434 Kabupaten/Kota, 6.453 Kecamatan dan 74.910 desa. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan desa agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 1: Data Dana Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tahun	Dana Desa
1	2015	294.145.000 juta
2	2016	596.324.000 juta
3	2017	758.815.000 juta
4	2018	674. 338.000 juta

Sumber: Kantor Desa Sako Margasari, 2018

Dilihat dari data Dana Desa yang diperoleh Desa Sako Margasari setiap tahunnya ada peningkatan. Namun peningkatan itu terjadi hanya pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 Dana Desa Sako Margasari mengalami penurunan. Seharusnya pada tahun 2018 ini Dana Desa dapat mengalami peningkatan yang signifikan untuk membangun desa supaya Desa Sako Margasari dapat lebih maju dan tidak kalah dengan desa-desa lainnya.

Tabel 2: Jenis kegiatan pembangunan Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Tahun				Ket
		2015	2016	2017	2018	
1	MCK Posyandu	29.450.000 juta	-	-	-	Belum terealisasi

2	Pembangunan sekolah TK	138.845.000 juta	-	-	-	Sudah terealisasi
						asi
3	Pembangunan kantor UED-SP	125.850.000 juta	-	-	-	Sudah terealisasi
						asi
4	Pembangun Posyandu	-	130.290.000 juta	-	-	Sudah terealisasi
						asi
5	Pembuatan Pagar MDA	-	113.979.000 juta	-	-	Sudah terealisasi
						asi
6	Pembukaan Jalan pecahan KK	-	83.447.000 juta	-	-	Belum terealisasi
						aiasi
7	Pengerasan Jalan	-	268.608.000 juta	-	-	Belum terealisasi
						asi
8	Book Cover	-	-	37.620.500 juta	-	Belum terealisasi
						asi
9	Pembangunan Posyandu	-	-	145.532.250 juta	-	Sudah terealisasi
						asi
10	Pembukaan jalan	-	-	63.217.000 juta	-	Belum terealisasi
						asi
11	Pengerasaan Jalan	-	-	478.845.250 juta	-	Belum terealisasi
						asi
12	Pembangunan sekolah PAUD	-	-	33.600.000 juta	-	Sudah terealisasi
						asi
13	Rabat Beton	-	-	-	219.196.000 juta	Belum terealisasi
						asi
14	Pengerasan jalan	-	-	-	306.435.000 juta	Belum terealisasi
						asi
15	Pembangunan Drainase	-	-	-	148.707.000 juta	Belum terealisasi
						asi
	Jumlah	294.145.000 juta	596.324.000 juta	758.815.000 juta	674.338.000 juta	

Sumber: Kantor Desa Sako Margasari, 2018

Yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan tersebut digunakan sesuai program. 2. Untuk mengetahui yang dihasilkan dari Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Dalam penelitian ini yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara yaitu pengaruh tata kelola dana desa dalam pembangunan belum optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Siagian (2017:4) Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Faried Ali (2015 : 12) Administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja didasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realitas empirik tentang esensi eksistensi manusia dalam pencapaian tujuan bersama. Willoughby dan Merriam (dalam Ali,2015 : 96) berpendapat bahwa administrasi negara pada waktu itu berkembang sebagai ilmu yang mandiri yang menekankan pada prinsip-prinsipnya secara universal.

Menurut The Liang Gie (dalam Kencana, 2010 : 14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Makmur dan Rohana(2017 : 31) Ilmu administrasi adalah salah satu pusat perhatian dan pemikiran menjadi bidang kajian utama untuk mempelajari proses kerja sama manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga melahirkan keteraturan berfikir dan bertindak.

Dari beberapa rumusan di atas dapat disimpulkan administrasi Negara adalah berbagai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh pemerintahan (eksekutif) dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasikan serta pengawasan program pembangunan dengan melibatkan legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.

2.2. Teori/Konsep Tata Kelola

Menurut Hayat (2017:167) *Good Governance* adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang baik. Sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang baik pula.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai “*stakeholder*”, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai “*stakeholder*”.

Menurut Hamdani(2016:20-22) Tata Kelola (Bahasa Inggris :*Corporate Governance*) adalah sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan

dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya.

Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan sudut pandang dalam pengertian lebih luas (*broad view*). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dengan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai *a web of relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (*stakeholders*) lain yaitu Karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainnya.

2.3. Teori/Konsep Pembangunan

Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Nurman, 2017: 87) pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Menurut Siagian (dalam Andri dan Khotami, 2018 : 2) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*notion building*)”.

Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Merurut Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001 : 222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

2.4. Teori/Konsep Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian (2017 : 4-5) Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*notion-building*).

Sedangkan menurut Tjokroamordjojo (dalam Listyaningsih 2014 : 18) administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara (pemerintah) untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu adaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Menurut Gant (dalam Listyaningsih 2014 : 18) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan sebagai penyempurnaan biokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintah untuk memenuhi

berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijaksanaan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan.

Menurut Siagian (2017 : 5) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuhan, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparatur dan sejumlah jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.

2.5. Teori/Konsep Pemberdayaan

Sedangkan menurut Widjaja (2014:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.

2.6. Teori/Konsep Desentralisasi Fiskal

Istilah Desentralisasi berasal dari bahasa “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan dari kata sentralisasi sebab kata “*de*” maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat.

Menurut Joenirto (dalam Andri dan Khotami, 2018 : 96) , asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonomi. Sedangkan Amrah Muslimin berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonomi (swatantra) yang berada di daerah-daerah.

Menurut Bahl (dalam Andri dan Khotami, 2018 : 99) desentralisasi fiskal yakni penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar level pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber daya ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah uang yang akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rahardjo Adisasmita (dalam Alsar dan Khotami, 2018 : 99) desentralisasi fiskal yaitu desentralisasi yang berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan (pembiayaan) daerah secara berkelanjutan.

Menurut Lowry (dalam Didik, 2016:29) konsep desentralisasi menggambarkan berbagai macam hubungan hukum, administratif, politik, dan fiskal antara lembaga pemerintah pusat dan otoritas pemerintah subnasional atau daerah.

2.7. Teori /Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik perusahaan ataupun instansi. Selain itu sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan .

Secara umum, sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu : sumber daya manusia makro dan sumber daya manusia mikro. Sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk di usia produktif yang ada di sebuah Negara. Sedangkan sumber daya manusia mikro lebih kecil cakupannya yaitu sebatas individu yang bekerja pada sebuah institusi.

Menurut Hasibuan (2001 :10) sumber daya manusia adalah “ Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat “.

Menurut Hariandja (2015) Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan selain faktor yang lainnya seperti kinerja ataupun modal.Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) harus di kelola dengan sangat baik supaya bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi perusahaan.

Sumarsono (2003:4) Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam menghasilkan barang dan jasa. Kedua adalah SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.8. Teori /Konsep Kebijakan

Menurut Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Sedangkan menurut Anderson (2010 :113) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (2010 : 120) mengklasifikasikan kebijakan, *policy*, menjadi dua : Substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

2.9. Teori/Konsep Keuangan Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sumber pendapatan. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Kamaroesid (2017:143) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan variabel yang diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1). Observasi. 2). Wawancara. 3). Kuisiner. 4). Pengumpulan dokumen-dokumen lainnya.

Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengatur variabel. Konsep variabel merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional dari suatu penelitian.

Tabel 3. Definisi Operasional Penelitian tentang Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Konsep	Indikator	Item Penelitian	Ukuran
----	--------	-----------	-----------------	--------

1.	Teori UNDP (dalam Mardiasmo, 2004 : 24)	1. <i>Participation</i>	1. Keikutsertaan masyarakat	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
		2. <i>Transparency</i>	2. Rencana anggaran Desa	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
		3. <i>Responsiveness</i>	3. Sosialisai anggaran	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
		4. <i>Accountability</i>	4. Peran aparatur desa	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
2.	Teori Alsar dan Khotami (2018 : 106-109)	5. Melakukan penyesuaian rencana (<i>Planning Adjustment</i>)	5. Sesuai kebutuhan masyarakat	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
		6. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran	6. Rincian penggunaan Dana	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik
		7. Optimalisasi peran serta masyarakat	7. Pelaksanaan program pembangunan	Sangat baik Baik Cukup baik Kurang baik Tidak baik

Sumber :Modifikasi Penelitian, 2018

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier sederhana.

Secara umum persamaan regresi sederhana yaitu dengan rumus berikut:

Rumus:

Keterangan $Y = a + bX$:

Y = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta atau bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pengujian Validitas dilakukan untuk menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrumen penelitian dikalatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka dinyatakan valid.
- b. Bila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 4. Tabel hasil Uji Validitas

No	Indikator	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Tata Kelola (X)	X1	0,562	0.205	Valid
		X2	0,724	0.205	Valid
		X3	0,584	0.205	Valid
		X4	0,619	0.205	Valid
		X5	0,514	0.205	Valid
		X6	0,542	0.205	Valid
		X7	0,688	0.205	Valid
		X8	0,436	0.205	Valid
		X9	0,606	0.205	Valid
		X10	0,536	0.205	Valid
		X11	0,694	0.205	Valid
		X12	0,721	0.205	Valid
		X13	0,591	0.205	Valid
		X14	0,624	0.205	Valid
		X15	0,611	0.205	Valid
		X16	0,407	0.205	Valid
		X17	0,610	0.205	Valid
		X18	0,574	0.205	Valid
		X19	0,600	0.205	Valid
		X20	0,544	0.205	Valid
2	Pembangunan (Y)	Y1	0,485	0.205	Valid
		Y2	0,607	0.205	Valid
		Y3	0,606	0.205	Valid
		Y4	0,702	0.205	Valid
		Y5	0,633	0.205	Valid
		Y6	0,391	0.205	Valid
		Y7	0,613	0.205	Valid
		Y8	0,506	0.205	Valid
		Y9	0,409	0.205	Valid

	Y10	0,377	0.205	Valid
	Y11	0,596	0.205	Valid
	Y12	0,647	0.205	Valid
	Y13	0,693	0.205	Valid
	Y14	0,594	0.205	Valid
	Y15	0,520	0.205	Valid

Sumber : Data Output SPSS, 2019

Pada tabel diatas uji validitas menunjukkan bahwa r hitung Variabel Tata Kelola (X) dan Variabel Pembangunan (Y) lebih besar dibandingkan r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur Variabel Tata Kelola dan Variabel Pembangunan dinyatakan Valid.

Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan *Cronbach Alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Kuefisien *Cronbach Alpha* yang lebih dari 0.60 menunjukkan keandalan (releabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tingginya konsistensi internal reliabilitas.

Tabel 5. Tabel Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Strandar Reliabilitas	Keterangan
1	Tata Kelola (X)	0.902	0.60	Reliabel
2	Pembangunan (Y)	0.844	0.60	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS, 2019

Pada tabel ini Uji releabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha semua variabel lebih besar dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan item atau kuesioner yang digunakan variabel Tata Kelola dan Pembangunan dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel Independen (X) dan variabel Dependen (Y). Atau variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel yang dipengaruhi (Y) pada penelitian ini yakni Tata Kelola (X) dan Pembangunan (Y).

Tabel 6. Tabel Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Part ial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.575	2.194		3.908	.000					
Tata_Kelola	.617	.036	.874	17.060	.000	.874	.874	.874	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Pembangunan

Data tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 8.575 + 0.617X$$

Adapun penjelasan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

a = Konstanta = 8.575

Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 8.575 besarnya Tata Kelola (Y). Apabila Pembangunan (X) adalah Konstan, maka tingkat Tata Kelola (Y) sebesar 8.575.

b = Konstanta regresi X= 0.617

Koefisien regresi pada variabel Pembangunan (X) adalah sebesar 0.617. Artinya adalah jika Tata Kelola (X) naik satu satuan, maka Pembangunan (Y) akan naik sebesar 0.617.

Untuk menentukan kuat atau lemahnya pengaruh antara variabel Tata Kelola (X) terhadap Pembangunan(Y) maka digunakan analisis korelasi.

Kekuatan hubungan korelasi R:

a. 0,000 - 0,199 = Sangat Lemah

b. 0,200 – 0,399 = Lemah

c. 0,400 – 0, 599 = Cukup Kuat

d. 0,600 – 0,799 = Kuat

e. 0,800 – 1,000 = Sangat Kuat

Berikut hasil perhitungan mengenai korelasi:

Tabel 7. Tabel Hasil Perhitungan Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.874 ^a	.764	.761	3.691523	1.760

a. Predictors: (Constant), Tata_Kelola

b. Dependent Variable: Pembangunan

Berdasarkan tabel analisis diatas diperoleh angka R yang disebut juga dengan Koefisien Korelasi antara variabel Tata Kelola terhadap Pembangunan adalah sebesar 0,874. Nilai ini berada diposisi 0,800-1,000 yang berarti pengaruh tata kelola terhadap pembangunan terdapatkekuatan hubungan yang sangat kuat. Akan tetapi aparaturnya Desa Sako Margasari belum bisa mengelolah dengan baik dana yang diperoleh desa untuk pembangunan yang telah tertata kelola dengan baik.

Koefisien Determinasi merupakan angka yang mewujudkan berapa besar variabel terkait (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel (X), yaitu Pembangunan dipengaruhi oleh Tata Kelola. Berikut hasil perhitungan mengenai korelasi:

Tabel 8. Tabel Hasil Perhitungan Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.874 ^a	.764	.761	3.691523	1.760

a. Predictors: (Constant), Tata_Kelola

b. Dependent Variable: Pembangunan

Berdasarkan tabel analisis diatas, diperoleh angka r^2 (R Square) atau disebut koefisien Determinasi adalah sebesar 0,764 atau sama dengan 76,4% (Rumus untuk menghitung koefisien

determinasi *Model Summary* ialah ($r^2 \times 100\%$). Angka tersebut mempunyai arti bahwa besarnya pengaruh Tata Kelola terhadap Pembangunan adalah 76,4%, sedangkan 23,4% sisanya yaitu dijelaskan di variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat kurang, masih banyak masyarakat yang acuh atau tidak peduli dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun ada bagian dari Organisasi Masyarakat/LSM yang mengawasi jalannya kegiatan pembangunan desa. Masyarakat juga enggan untuk menghadiri rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa meskipun telah diberikan surat oleh pemerintah desa. Namun pada kenyataannya, masyarakat Desa Sako Margasari ikut serta hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Hal ini dilihat sesuai dengan absensi/daftar hadir masyarakat dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sako Margasari untuk mendengarkan pendapat atau keinginan masyarakat mengenai apa saja yang dibutuhkan baik dalam kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya.

Dalam observasi penelitian ini, peneliti melihat kurang transparannya pemerintah desa dalam setiap dana yang diperoleh dan dianggarkan oleh desa baik itu dalam kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dana desa yang diperoleh Desa Sako Margasari belum secara transparan ditunjukkan kepada masyarakat, baru di tahun 2018 anggaran dana desa secara transparan dipublikasikan kepada masyarakat karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk hal tersebut. Saat ini juga setiap proyek pembangunan diberikan plang rincian anggaran dana. Hal ini agar masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran dana yang didapatkan dan dipergunakan untuk apa saja oleh pemerintah desa.

Untuk sosialisasi anggarandana desa kepada masyarakat, aparatur desa beserta jajarannya hanya melalui rapat musyawarah rencana pembangunan desa dan pemberitahuannya melalui spanduk rincian anggaran dana desa yang di pampang di depan kantor Desa Sako Margasari. Sampai saat ini belum ada sosialisasi lebih lanjut terhadap anggaran dana desa selain yang diatas tersebut. Seharusnya pemerintah desa bisa memberikan sosialisasi anggaran dana kepada masyarakat di setiap kegiatan yang ada di desa agar masyarakat tidak salah dalam menilai tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik itu kepala desa maupun jajarannya. Jika sosialisasi dilakukan hanya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa itu hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahuinya.

Dalam peran aparatur desa yang peneliti lihat cukup baik dalam tanggungjawabnya menanggapi masyarakat yang datang ke kantor desa untuk keperluan-keperluan tertentu salah satunya yaitu pembuatan surat, akan tetapi masyarakat banyak yang mengeluh ketika mereka mengurus surat ke desa dibebankan uang adminstrasi yang cukup mahal. Lalu peneliti mencoba mengurus surat ke kantor desa untuk memastikan hal tersebut, dan ternyata itu benar. Satu surat dipatok Rp. 25.000. Setelah itu peneliti tanya kepada aparatur desa bukankah segala urusan di kantor desa itu tidak dikenakan biaya? Tetapi mereka mengatakan hal tersebut ada undang-undang yang mengatur, ketika peneliti tanyamenegenai undang-undang tersebut aparatur desa tidak dapat metunjukkan undang-undang tersebut. Seharusnya tugas dari aparatur desa itu melayani dan mempermudah masyarakat dalam urusan di kantor desa bukan malah mempersulit dengan memberatkan biaya administrasi seperti ini.

peneliti melihat sejauh ini pembangunan yang dilaksanakan di desa sako margasari sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun ada bangunan posyandu yang tidak digunakan sebagai posyandu, akan tetapi bangunan tersebut digunakan untuk rumah bidan desa.

Padahal rumah untuk bidan desa sudah ada dan saat ini tidak digunakan. Saat ini ibu-ibu yang membawa anaknya dan para Lansia yang ingin datang untuk posyandu tidak diposyandu tersebut, melainkan di halaman depan posyandu yang di tempati oleh bidan desa. Lalu bagaimana seharusnya Kepala Desa bisa lebih bijak dalam menindak hal tersebut agar masyarakat dapat menempati posyandu yang dibangun untuk masyarakat dan rumah bidan yang sudah ada dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam menjaga konsistensi dan penganggaran dana aparatur desa menganggarkan sesuai dengan kebutuhan desa. Akan tetapi pada tahun 2018 dana desa yang diperoleh oleh desa sako margasari mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 dana desa mengalami silva yang cukup banyak oleh karena itu pada tahun 2018 dana desa mengalami penurunan. Dengan terjadinya hal ini sangat merugikan desa dan jugamasyarakat. Harusnya aparatur desa bisa meningkatkan dana desa yang diperoleh oleh desa bukan malah yang sebaliknya.

Sejauh ini peran masyarakat Desa Sako Margasari sudah cukup optimal dalam segala kegiatan yang ada di desa sako margasari, baik itu dalam kegiatan pembangunan, PKK, karang taruna dan masih banyak lagi kegiatan yang terdapatdidalamnya peran masyarakat sudah cukup besar. Oleh karena itu masyarakat harus dapat meningkatkan lagi peran masyarakat dalam kegiatan yang ada di Desa Sako Margasari agar desa yang kita cintai ini dapat lebih baik dan maju seperti desa-desa lain yang ada disekitar Desa Sako Margasari.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Tata Kelola Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu memiliki hubungan yang **Sangat Kuat**.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Andri Alsar, Khotami. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Edisi I. CV. Budi Utama : Yogyakarta.
- Buku pedoman penyusunan tugas akhir (skripsi) Universitas Islam Kuantan Singing.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Edisi I. Mitra Wacana Media : Jakarta
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Edisi I. Rajawali Pers : Jakarta.
- IndrawatiSriMulyani . 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Rapublik Indonesia : Jakarta.
- Kamaroerid Herry. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Edisi I. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Listyaningsih.2014. *Administrasi Pembangunan; Pendekatan konsep dan implementasi*. Edisi I. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Makmur dan Rohana Thahier, 2017.*Kerangka Teori Dan Ilmu Administrasi Negara*. Edisi I. RajaGrafindo Persada : Depok.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi II. ANDI : Yogyakarta.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial; Konsep-konsep Kunci*. Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

- Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Edisi I. PT. Raja Grafindo Persada : Depok.
- Purwanto Erwan Agus, Dyan Ratih Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Edisi I. Gava Media :Yogyakarta.
- Siagian Sondang P, 2017. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Edisi II. Bumi Aksara : Jakarta.
- Siagian Sondang P, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. edisi I. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Edisi I. Alfabeta : Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman.2005, *PerencanaanPembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi I. CV. Citra Utama : Jakarta.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemadirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Edisi I. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Syafiie Inu Kencana, 2010.*Ilmu Administrasi Publik*. Edisi I. Reneka Cipta : Jakarta. Syakrani, Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Edisi I. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2014.*Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi I. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Edisi I. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.